

MENGAPA INDONESIA MENJADI SASARAN SINDIKAT NARKOBA INTERNASIONAL?

7

Sita Hidriyah

Abstrak

Dalam waktu kurang dari sebulan, pada bulan Februari 2018 Kepolisian dan Bea Cukai RI telah menggagalkan empat kali kasus dan dugaan penyelundupan narkotika dan obat-obat-obatan terlarang (narkoba) berskala internasional. Meskipun berhasil digagalkan, hal ini menjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan dan menjadi peringatan bahwa Indonesia telah menjadi sasaran sindikat narkoba internasional. Pasar Indonesia yang sangat potensial bagi peredaran narkoba menjadi salah satu faktor penting bagi terus berlangsungnya penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang rentan, terbatasnya jumlah aparat keamanan, dan kurang optimalnya kerja sama antarnegara juga menjadi faktor yang turut memengaruhi terjadinya peningkatan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kerja sama internasional perlu diperkuat, khususnya di antara negara tetangga di kawasan dalam menanggulangi penyelundupan narkoba. Secara internal, Indonesia juga harus memperkuat regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan narkoba.

Pendahuluan

Kejahatan penyelundupan narkoba dari luar negeri ke Indonesia masih saja terus terjadi dan semakin meningkat akhir-akhir ini. Dalam tiga pekan terakhir pada bulan Februari 2018 saja, lebih dari dua ton narkoba berhasil dibongkar oleh aparat keamanan, termasuk penyelundupan sekitar 1 ton narkoba jenis sabu dari China di perairan Batam, Kepulauan Riau (*Kompas.com.*, 20/2/2018). Meningkatnya aktivitas penyelundupan narkoba ke Indonesia tersebut seakan menunjukkan bahwa Indonesia sudah menjadi

pasar potensial bagi sindikat narkoba internasional. Akhir-akhir ini modus penyelundupan lebih banyak dilakukan melalui jalur laut, antara lain melalui kapal asing yang berasal dari China, Taiwan, dan Vietnam.

Hasil interogasi pihak kepolisian terhadap para tersangka menunjukkan bahwa apabila penyelundupan narkoba dilakukan melalui laut, kapal-kapal dapat menampung narkoba dalam skala besar dan pengamanan di wilayah perairan pun biasanya tidak seketat di wilayah darat. Maraknya



aktivitas penyelundupan narkoba tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa Indonesia menjadi sasaran sindikat narkoba internasional? Hal tersebut akan coba dibahas, setelah terlebih dahulu diungkap secara sekilas aktivitas penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh kapal asing akhir-akhir ini.

Penyelundupan Narkoba oleh Kapal Asing

Selama bulan Februari 2018 terdapat empat kapal ikan asing yang diamankan dan berkembang menjadi kasus serta dugaan penyelundupan narkoba ke Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Penangkapan tersebut dilakukan oleh Satgas Gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri dan Bea Cukai. Peristiwa pertama adalah penangkapan kapal MV Sunrise Glory di perairan Selat Philip, dekat Provinsi Kepulauan Riau pada 7 Februari 2018. Kapal tersebut diduga menggunakan dokumen palsu dan sering berganti bendera sesuai negara yang dilewati (Kompas.com., 09/02/2018).

Selanjutnya, pada 20 Februari 2018, masih di sekitar perairan Kepulauan Riau, diamankan kapal FV Min Lian Yu Yuan 61870, kapal berbendera Singapura dengan empat anak buah kapal warga negara Taiwan. Pada 23 Februari 2018, ditangkap kapal MV Win Long BH 2998, serta penangkapan kapal MV Fu Yu BH 2916 pada 25 Februari 2018. Dari rangkaian penangkapan kapal ikan asing ini, terkuak dugaan upaya penyelundupan sabu dalam jumlah besar. Berdasarkan hasil investigasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN), pada kapal MV Sunrise Glory ditemukan 1.037 ton sabu (Kompas.com., 25/02/2018).

Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi yang masuk kepada Direktur Narkoba Polda Metro Jaya dan Kasubdit 2 Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Mereka mendapatkan informasi akan adanya kapal pengangkut narkoba yang memasuki wilayah Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan, pemetaan terhadap garis pantai yang dapat digunakan untuk membongkar sabu dari kapal, melakukan koordinasi dengan sumber informasi, memantau pergerakan kapal di laut, dan diakhiri dengan mengamankan kapal-kapal asing yang melakukan penyelundupan narkoba tersebut. Semua kapal asing tersebut diamankan dan ditangkap di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau.

Ditangkapnya kapal-kapal asing penyelundup narkoba di wilayah perairan Kepulauan Riau yang berbatasan dengan wilayah negara tetangga, menunjukkan bahwa wilayah perairan perbatasan sering dimanfaatkan oleh sindikat internasional untuk menyelundupkan narkoba. Perairan Kepulauan Riau selain mempunyai garis pantai yang panjang, juga terdapat puluhan pelabuhan tikus yang tersebar di sepanjang pantai. Hal tersebut menjadikan wilayah perairan Kepulauan Riau sebagai jalur yang banyak dipilih oleh sindikat internasional untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia.

Indonesia sebagai Sasaran

Besarnya jumlah narkoba yang diselundupkan dan disita oleh aparat keamanan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkoba dan target operasi sindikat internasional. Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia merupakan pasar narkoba yang menguntungkan bagi sindikat internasional, sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, membuat para pengedar narkoba melihat Indonesia sebagai pasar potensial. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara (separuh dari penduduk ASEAN yang berjumlah lebih dari 500 juta jiwa), ditambah dengan pengguna narkoba yang cenderung meningkat jumlahnya, Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi sindikat narkoba internasional.

Kondisi geografis Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kasus penyelundupan narkoba terus terjadi. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairannya yang terbuka. Kondisi geografis tersebut membuat Indonesia sangat rawan terhadap berbagai upaya penyelundupan, termasuk narkoba oleh sindikat internasional. Penyelundupan narkoba terjadi karena wilayah perbatasan Indonesia paling mudah untuk dimasuki, terutama dari Malaysia ke Kepulauan Riau. Ditambah lagi dengan terbatasnya jumlah aparat keamanan yang

bertugas melakukan pengawasan di lapangan, semakin membuat leluasa para sindikat internasional menyelundupkan narkoba ke Indonesia.

Faktor lainnya adalah belum optimalnya kerja sama internasional, khususnya di antara beberapa negara di kawasan (seperti China, Malaysia, Vietnam, dan Myanmar) dengan Indonesia, padahal negara-negara tersebut sudah meratifikasi sejumlah konvensi internasional anti-narkoba, antara lain *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988, yang di dalamnya mengharuskan adanya kerja sama internasional (antarnegara) dalam menanggulangi masalah narkoba yang sudah menjadi bagian dari kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*). Kasus-kasus penyelundupan narkoba yang kembali marak dan masuk ke Indonesia, yang berasal dari atau melalui beberapa negara di kawasan, memperlihatkan belum optimalnya kerja sama internasional itu. Belum optimalnya kerja sama internasional dalam memerangi narkoba bisa memunculkan pandangan negatif, seolah ada negara atau pihak tertentu yang melakukan *proxy war* dan ingin menaklukkan Indonesia melalui narkoba.

Belum optimalnya kerja sama internasional tersebut juga terjadi di lingkup ASEAN. Diakui bahwa melalui forum *ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD)*, ASEAN telah berupaya menanggulangi masalah narkoba, atau setidaknya melalui ASOD, negara-negara ASEAN dapat

bertukar informasi dan berdiskusi tentang penanggulangan masalah narkoba. Namun, adanya fakta di lapangan yang memperlihatkan kasus-kasus penyelundupan narkoba tetap marak, seperti yang terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa ASEAN dengan forum ASOD-nya belum optimal menanggulangi masalah narkoba. Kerja sama antarnegara ASEAN tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Penyelundupan narkoba merupakan bagian dari sindikat internasional, sehingga upaya penanganannya pun harus dilakukan secara internasional melalui kerja sama antarnegara.

Untuk kerja sama antara Indonesia dan Malaysia misalnya, memang kepolisian Indonesia dengan pihak kepolisian Malaysia sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, kedua pihak selain saling berbagi pengalaman dan informasi seputar modus penyelundupan narkoba, juga berbagi pengetahuan tentang upaya mengatasi penyelundupan narkoba. Namun, kerja sama tersebut tidak cukup hanya melalui forum-forum pertemuan, tetapi juga perlu dilakukan melalui kerja sama di lapangan, misalnya melakukan patroli bersama secara berkala dan lebih intens di sekitar kawasan perbatasan. Patroli bersama di perairan perbatasan dalam jadwal-jadwal tertentu memang sudah ada, namun intensitasnya perlu ditingkatkan lagi, khususnya untuk mengatasi ancaman bahaya narkoba yang semakin nyata.

Ketentuan hukum di Indonesia yang tidak terlalu berat atau tidak tegas dalam

menyikapi masalah narkoba, juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan aktivitas penyelundupan narkoba terus terjadi ke Indonesia. Di Indonesia terdapat hukuman mati sebagai hukuman maksimal bagi pengedar, tetapi di Malaysia pengguna pun sudah bisa dihukum mati. Di Filipina, setelah Rodrigo Duterte terpilih menjadi presiden, negara itu mengambil sikap yang lebih tegas terhadap persoalan narkoba. Ketentuan dan penegakan hukum pada akhirnya menjadi tantangan setiap negara, dan setiap negara memiliki kepentingan dan cara pendekatan yang tidak sama dalam menyikapi persoalan narkoba.

Penutup

Dari uraian di atas terlihat bahwa pasar Indonesia yang sangat potensial bagi peredaran narkoba menjadi salah satu faktor penting bagi terus berlangsungnya penyelundupan narkoba ke Indonesia oleh sindikat internasional. Kondisi geografis Indonesia yang rentan, terbatasnya aparat keamanan, dan kurang optimalnya kerja sama antarnegara juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan jika Indonesia ingin menanggulangi penyelundupan narkoba secara maksimal. Kerja sama internasional perlu memanfaatkan forum-forum yang tersedia, baik di lingkup antarpemerintah maupun antarparlemen. Khusus di ASEAN, tidak cukup hanya memanfaatkan ASOD, yang lebih berfungsi sebagai forum pertukaran informasi semata, tetapi perlu juga ada langkah tindak lanjut di lapangan yang lebih konkret.

Penanganan penyelundupan narkoba secara lintas batas tidak cukup dilakukan hanya melalui kerja sama antarkepolisian, tetapi juga perlu melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti pihak bea dan cukai, imigrasi, dan aparat keamanan laut lainnya. Kerja sama pengamanan laut di wilayah perairan perbatasan harus mendapatkan prioritas, mengingat wilayah perairan perbatasan sering digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba oleh sindikat internasional. Wilayah perairan perbatasan yang luas dan banyaknya pelabuhan tikus perlu mendapatkan perhatian dalam kerja sama pengamanan laut antarnegara, khususnya antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan masalah narkoba. Sangat diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk menyikapi persoalan narkoba. Pemberian hukuman yang seberat-beratnya sangat diperlukan sehingga Indonesia tidak terus menjadi sasaran sindikat internasional. Terlebih Presiden Joko Widodo pernah mengemukakan bahwa Indonesia berada dalam status darurat narkoba. Ini artinya Indonesia tidak bisa bergantung kepada negara luar dalam menanggulangi masalah narkoba, sehingga memberantas narkoba menjadi tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Referensi

- “Bea Cukai Sebut Modus Penyelundupan Narkoba Terus Berkembang”, *Republka.co.id.*, 9 Januari 2018, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/18/01/09/p29yr6368-bea-cukai-sebut-modus-penyelundupan-narkoba-terus-berkembang>, diakses 28 Februari 2018.
- “Gempur Narkoba, Perang Simetris Menaklukkan Indonesia”, *Republika*, 21 Februari 2018, hal. 10.
- “Ini Penyebab Penyelundupan Narkoba Masih Marak”, *Republika.co.id.*, 18 Februari 2018, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/18/p4clr1368-ini-penyebab-penyelundupan-narkoba-masih-marak>, diakses 28 Februari 2018.
- “Kerap Ganti Bendera dan Dokumen Palsu, Kapal Sunrise Glory Diamankan”, *Kompas.com*, 9 Februari 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/02/09/09341001/kerap-ganti-bendera-dan-dokumen-palsu-kapal-sunrise-glory-diamankan>, diakses 28 Februari 2018.
- “Mengapa Banjir Narkoba di Indonesia Terus Meningkat?”, *BBC.com*. 26 Februari 2018, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>, diakses 27 Februari 2018.
- “Polri Akan Kerja Sama dengan Polisi China Terkait Penyelundupan 1,6 Ton Sabu”, *Kompas.com.*, 27 Februari 2018, <http://nasional.kompas.com/read/2018/02/27/13591461/polri-akan-kerja-sama-dengan-polisi-china-terkait-penyelundupan-16-ton-sabu>, diakses 28 Februari 2018.

"Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun, *Kompas.com.*, 28 Februari 2018, <http://nasional.kompas.com/read/2018/02/25/17151141/polri-belum-temukan-narkoba-di-kapal-win-long-yang-ditangkap-di-perairan>, diakses 27 Februari 2018.

"Polisi dan Bea Cukai Ungkap Penyelundupan Sabu 1,8 Ton di Batam", *Kompas.com.*, 20 Februari 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/17194411/polisi-dan-bea-cukai-ungkap-penyelundupan-sabu-18-ton-di-batam>, diakses 28 Februari 2018.

"Susi: Pelabuhan Tikus Jadi Celah untuk Penyelundupan Narkoba", *Kompas.com.*, 27 Februari 2018, <http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/27/194706626/susi-pelabuhan-tikus-jadi-celah-untuk-penyelundupan-narkoba>, diakses 28 Februari 2018.



Sita Hidriyah
sita.hidriyah@dpr.go.id

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.